

## **LAPORAN STUDI**

### **POTENSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PENDIRI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN**



**Disusun oleh:**

**Tim Studi Potensi Bank Pembangunan Daerah  
Sebagai Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2010**

## ABSTRAKSI

Studi ini bertujuan untuk mempelajari potensi yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai penyelenggara program pensiun bagi pekerja mandiri melalui DPLK. Selain itu mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan BPD dalam mendirikan atau tidak mendirikan DPLK.

Metode kajian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak-pihak terkait.

Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator internal, mayoritas BPD memiliki potensi sebagai penyelenggara DPLK. Kondisi ini kurang didukung oleh faktor eksternal. Kekhawatiran atas respon pasar atas DPLK menjadi faktor utama yang menghalangi BPD untuk mendirikan DPLK.

*The objective of this research is firstly to study the potential of the Regional Development Banks (BPD) as an administrator of self-employed pension program (DPLK). Secondly to analyze the factors that will influence the decision of BPD to act as self-employed pension administrator.*

*Assessment method used were descriptive analytical. This research uses primary and secondary data. The primary data has taken from questionnaires. At the same time, the secondary data is collected from Central Statistics of Indonesia (BPS) and Bank Indonesia (BI).*

*The main finding of this research is based on internal indicators, that majority of BPD has potential as an administrator of DPLK. But this condition is not supported by external factors. Concerns over market response over DPLK be a major factor that prevents BPD to establish DPLK.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga Tim dapat menyelesaikan penulisan laporan hasil studi potensi bank pembangunan daerah sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan.

Penelitian ini, meskipun masih pada tahap awal, diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai potensi yang dimiliki BPD untuk menyelenggarakan program pensiun melalui DPLK. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi regulator dalam merumuskan strategi pengembangan industri dana pensiun khususnya dana pensiun lembaga keuangan.

Kami menyadari bahwa studi ini belum sempurna. Karena itu, masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan. Kami berharap pula, studi ini dapat mendorong penelitian-penelitian lanjutan mengenai dana pensiun khususnya dana pensiun lembaga keuangan, sebagai kontribusi yang dapat diberikan untuk mewujudkan industri dana pensiun yang semakin tangguh dan kompetitif pada masa yang akan datang.

Akhir kata Tim Studi mengucapkan terima kasih kepada segenap Pihak yang telah membantu penyelesaian studi ini. Kritik maupun saran yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan penelitian ini.

Jakarta, Desember 2010  
Ketua Tim Studi

## DAFTAR ISI

ABSTRAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Masalah Penelitian.....	3
I.3 Tujuan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
II.1 Estimasi Pasar Potensial.....	5
II.1.1 Target Pasar .....	6
II.1.2 Wilayah Pemasaran.....	6
II.1.3 Pesaing .....	7
II.1.4 Pangsa Pasar .....	7
II.2 Bank .....	8
II.2.1 Usaha Bank Umum.....	10
II.2.2 Penilaian Kesehatan Bank .....	13
II.2.3 Faktor Penilaian kesehatan Bank.....	14
II.3 Dana Pensiun Lembaga Keuangan(DPLK).....	17
II.3.1 Syarat Pendirian DPLK .....	18
II.4 Penelitian Sebelumnya .....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	21
III.1. Jenis studi.....	21
III.2. Populasi dan Metode pengambilan sampel.....	22
III.3. Metode pengumpulan data.....	23
III.4. Jenis dan sumber data .....	25
III.5. Metode Analisis .....	26
BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....	27
IV.1 Potensi berdasarkan indikator internal.....	27
IV.1.1 Aspek Keuangan .....	28
IV.1.2 Aspek Operasional .....	30
IV.1.3 Dukungan Infrastruktur .....	32
IV.1.4 Kesiapan SDM .....	33
IV.2 Potensi berdasarkan indikator Eksternal.....	34
IV.2.1 Demografi.....	35
IV.2.2 Pelaku Ekonomi lokal .....	37
IV.2.3 Perkembangan ekonomi lokal .....	38
IV.3 Pemahaman dan dan aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan BPD .....	41
BAB V KESIMPULAN .....	47
V.1 Kesimpulan .....	47
V.2 Rekomendasi.....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	474
LAMPIRAN	

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Piramida Penduduk Indonesia 2010 .....	35
Grafik 2 Proyeksi Penduduk Usia 15-49 .....	36
Grafik 3 Pemahaman terhadap industri DPLK .....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perkembangan Peserta Dana Pensiun .....	2
Tabel 2	<i>Loan to Deposit Ratio</i> (persen) Kelompok BPD tahun 2008 dan 2009 .....	29
Tabel 3	Wilayah yang berpotensi berdasarkan Indikator Internal .....	31
Tabel 4	Dukungan Sistem Informasi pada Operasional BPD .....	33
Tabel 5	Jumlah Usaha Mikro, Perusahaan Kecil, Menengah dan Besar .....	37
Tabel 6	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000, 2009 .....	39
Tabel 7	Peta potensi berdasarkan indikator eksternal .....	40
Tabel 8	Gabungan Indikator internal dan eksternal .....	41
Tabel 9	Aspek yang mempengaruhi keputusan untuk mendirikan DPLK .....	44
Tabel 10	Aspek yang mempengaruhi keputusan untuk TIDAK mendirikan DPLK .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Dana Pensiun sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) sudah dibuktikan di berbagai belahan dunia mampu memberikan peran penting dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan suatu negara dapat dicapai melalui LKNB yang berfungsi dengan baik sehingga dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan akses terhadap jasa keuangan dan memperbaiki stabilitas sistem keuangan dalam suatu negara. Berdasarkan Laporan Bank Dunia tahun 2006, Sektor Dana Pensiun Indonesia masih terhitung kecil, secara keseluruhan menguasai aset senilai kurang dari 4,7% PDB. Hal ini dapat dibandingkan dengan Thailand (8,4%), Malaysia (57%) dan Australia (75%). Hal ini menunjukkan LKNB khususnya Dana Pensiun di Indonesia seharusnya dapat digerakkan lebih maksimal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.

Selanjutnya berdasarkan Laporan tahunan Dana Pensiun 2008, Jumlah Dana Pensiun yang masih aktif terdiri dari 281 Dana Pensiun, terdiri dari 255 Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan 26 Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Sementara jumlah total peserta dana Pensiun terdiri dari 2.559.222 orang. Jumlah peserta Dana Pensiun baik DPPK maupun DPLK masing-masing berbagi sebesar 53.9% dan 46.1%. Apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang aktif sebesar 52,1 juta jiwa maka berarti jumlah pekerja yang menjadi peserta Dana Pensiun hanya 4,91%.

Kondisi pertumbuhan jumlah peserta Dana Pensiun cenderung meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah peserta DPLK sebesar 9,02% sementara DPPK hanya sebesar 2.15%. Dari kondisi pertumbuhan ini, terdapat beberapa hal yang dapat diambil sebagai potensi untuk mengembangkan Sektor Dana Pensiun khususnya melalui DPLK. Pertama, adanya kecenderungan DPPK mengalihkan karyawan barunya untuk diikutsertakan sebagai peserta DPLK. Hal ini terlihat dari perbedaan peningkatan peserta aktif pada DPPK yang cenderung tidak bertumbuh secara signifikan. Kedua, adanya kecenderungan DPLK yang didirikan oleh Bank dan asuransi jiwa ini berkinerja semakin baik sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada peserta mandiri yang baru.

**Tabel 1. Perkembangan Peserta Dana Pensiun**

<b>Uraian / Description</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>Kenaikan / Penurunan Increase / Decrease</b>
(1). Peserta Aktif DPPK <i>Active participants of EPF</i>	946.904	950.328	0,36%
(2). Peserta Pasif DPPK <i>Passive participants of EPF</i>	404.063	429.785	13,80%
- Pensiunan <i>Pensioners</i>	250.930	267.594	6,64%
- Janda/Duda <i>Widow/Widower</i>	84.421	92.649	9,75%
- Anak <i>Children</i>	2.623	2.711	3,35%
- Pensiun Ditunda <i>Deffered Pensioners</i>	66.089	66.831	1,12%
(3). Jumlah Peserta DPPK (1) + (2) <i>Sum of EPF participants</i>	1.350.967	1.380.113	2,15%
(4). Peserta Aktif DPLK <i>Active participants of FIPF</i>	1.012.051	1.106.773	9,36%
- Peserta Mandiri <i>Individual participants</i>	394.551	429.312	8,81%
- Peserta Kelompok <i>Group participants</i>	617.500	677.461	9,71%
(5). Peserta Pasif DPLK (Pensiun Ditunda <i>Passive participants of FIPF or Deffered Pensioners of FIPF</i>	69.423	72.226	4,04%
(6) Jumlah Peserta DPLK (4) + (5) <i>Sum of FIPF participants</i>	1.081.474	1.178.999	9,02%
<b>TOTAL Peserta Dana Pensiun (3) + (6) <i>Total of Pension Funds Participants</i></b>	<b>2.432.441</b>	<b>2.559.112</b>	<b>5,21%</b>

Sumber: Laporan Tahunan Dana Pensiun 2008

Dari 26 Dana Pensiun Lembaga Keuangan di Indonesia, 6 diantaranya merupakan Dana Pensiun yang didirikan oleh Bank sementara sisanya didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Dari 6 DPLK yang didirikan oleh Bank, terdapat 2 (dua) DPLK didirikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Total kekayaan Dana Pensiun DPLK diketahui masing-masing 40,75 persen bagi Dana Pensiun yang didirikan oleh bank dan selebihnya merupakan kekayaan Dana Pensiun yang didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Dari data diatas terlihat jelas DPLK khususnya yang didirikan bank pembangunan daerah masih sangat potensial untuk dikembangkan untuk memaksimalkan pertumbuhan sektor Dana Pensiun di Indonesia. Untuk itu, dipandang perlu untuk melakukan studi komprehensif untuk mengkaji potensi DPLK khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai penyelenggara DPLK. Hal ini diharapkan akan dapat berkontribusi mewujudkan industri Dana Pensiun Indonesia yang semakin baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## **I.2 Masalah Penelitian**

Permasalahan utama yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mempelajari potensi Bank Pembangunan Daerah untuk bertindak sebagai pendiri dana pensiun khususnya dana pensiun lembaga keuangan dan sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat BPD untuk menggunakan pengalaman mereka sebagai pengelola dana pensiun pemberi kerja dan juga keahlian yang mereka miliki dalam mengelola keuangan.

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Melakukan kajian potensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai penyelenggara DPLK di Indonesia.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan BPD untuk mendirikan atau tidak mendirikan DPLK.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Estimasi Pasar Potensial**

Amstrong dan Kotler (1997:117), memberikan definisi pasar potensial sebagai sekumpulan konsumen yang mempunyai tingkat minat terhadap sebuah penawaran pasar yang didefinisikan. Konsumen potensial harus mempunyai pendapatan yang cukup untuk membeli produk tersebut, dan mereka harus mempunyai akses terhadap produk yang ditawarkan.

Untuk mengetahui besarnya suatu potensi pasar atas suatu produk perlu dilakukan analisa terhadap potensi pasar yang ada. Analisa potensi pasar dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran.

Pendekatan permintaan menekankan tentang kebutuhan manusia yang sampai sekarang belum sepenuhnya terpenuhi atau kemungkinan sudah terpenuhi namun kurang memuaskan. Misalnya, penghapusan subsidi minyak tanah mengakibatkan antrian masyarakat pada agen penjual minyak tanah. Melalui pendekatan permintaan dapat diketahui jumlah permintaan terhadap produk/jasa yang meliputi jumlah dan konsumen yang dituju, total kebutuhan secara periodik.

Pendekatan penawaran menekankan pada kemampuan produsen untuk membuat atau menyediakan produk atau jasa atau gabungan dari keduanya. Setelah kemampuan produksi diketahui, barulah mulai mencari pasar atas produk tersebut.

Melalui pendekatan penawaran dapat diidentifikasi banyaknya pesaing yang membuat produk atau jasa yang sama.

### **II.1.1 Target Pasar**

Target pasar merupakan kelompok pelanggan yang memiliki kecenderungan paling tinggi untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan. Target pasar diidentifikasi dengan menggunakan dua variabel. Pertama, variabel demografis seperti Status Usia Perkawinan, Tingkat Penghasilan, Gender, suku bangsa, dan tingkat pendidikan. Kedua, variabel psikografis seperti aliran politik, orientasi keluarga, *trend follower*, olahraga favorit.

Variabel psikografis dapat memberikan informasi yang lebih akurat daripada variabel demografis dalam menggambarkan perilaku konsumen. Kesulitan dalam memperoleh data yang relevan mengenai variabel psikografis mengakibatkan variabel ini jarang digunakan dalam menentukan profil target pasar.

### **II.1.2 Wilayah Pemasaran.**

Wilayah pemasaran merupakan tempat beroperasi suatu kegiatan bisnis pada suatu daerah. Penetapan wilayah pemasaran penting dilakukan untuk memberikan informasi mengenai wilayah potensial yang memiliki calon pembeli potensial yang secara ekonomis dapat dijadikan target pemasaran. Terdapat tiga metoda yang paling umum digunakan dalam menentukan wilayah pemasaran yaitu letak geografis, radius wilayah atau jarak tempuh.

Penetapan wilayah pemasaran berdasarkan letak geografis merupakan metoda yang paling umum digunakan. Metoda ini memanfaatkan batas geografis yang

dipergunakan oleh pemerintah setempat seperti kelurahan, kode pos, wilayah administratif atau batas provinsi.

Metoda radius wilayah membagi wilayah pemasaran berdasarkan jarak tertentu dari suatu lokasi bisnis. Teknik yang digunakan menyerupai layanan sinyal operator selular pada satu BTS yang hanya dapat menjangkau wilayah dalam jarak tertentu dari lokasi BTS tersebut.

Penggunaan jarak tempuh dalam menetapkan wilayah pemasaran merupakan metoda yang menggabungkan beberapa variabel seperti jarak tempuh, lebar jalan, kondisi jalan, tingkat kemacetan dalam menentukan wilayah pemasaran.

### **II.1.3 Pesaing**

Analisa yang tepat mengenai pesaing dapat memberikan banyak informasi yang dibutuhkan sebelum memasuki pasar. Informasi yang didapat memberikan gambaran bagaimana pesaing memasarkan produk, siapa pangsa pasar yang menjadi target penjualan dan informasi lainnya. Pemanfaatan informasi tersebut mempermudah perusahaan untuk melakukan segmentasi pasar yang masih potensial untuk digarap.

### **II.1.4 Pangsa Pasar**

Pangsa pasar merupakan jumlah penjualan produk yang dapat dicapai oleh perusahaan. Mengetahui besar pangsa pasar merupakan hal penting untuk menentukan berapa besar potensi pasar yang dapat digarap oleh perusahaan. Masalah akan muncul jika pangsa pasar atas suatu produk tidak cukup besar untuk mendukung kegiatan usaha. Dengan kata lain, jika pangsa pasar atas suatu produk tidak dapat mencapai titik *break even*, maka produksi atas produk tersebut perlu dievaluasi kembali.

Perkiraan besarnya pangsa pasar atas suatu produk atau jasa sulit dilakukan jika informasi yang dibutuhkan tidak tersedia. Terkadang estimasi dengan berbagai macam skenario untuk memprediksi pangsa pasar yang ada.

## II.2 Bank

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia "*banca*" yang memiliki arti sebagai tempat penukaran uang. Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan **bank** adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*

Kemudian menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31 mengenai Bank adalah :

*"Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (defisit unit) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran".*

Pengertian Bank menurut. H. Malayu S.p Hasibuan :

*"Bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (Financial Assets) serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja."*

Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank berdasarkan undang-undang, yaitu :

1. Bank umum adalah : Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selain itu berdasarkan Kepemilikan Bank dapat juga dibagi menjadi 5 kategori yaitu:

1. Bank Milik Negara adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Tahun 1999 lalu lahir bank pemerintah yang baru yaitu Bank Mandiri, yang merupakan hasil merger atau penggabungan bank-bank pemerintah yang ada sebelumnya.
2. Bank Pemerintah Daerah adalah bank-bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Bank milik Pemerintah Daerah yang umum dikenal adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang didirikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962. Masing-masing Pemerintah Daerah telah memiliki BPD sendiri. Di samping itu beberapa Pemerintah Daerah memiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
3. Bank Swasta Nasional, Setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi pada bulan Oktober 1988 (Pakto 1988), muncul ratusan bank-bank umum swasta nasional yang baru. Namun demikian, bank-bank baru tersebut pada akhirnya banyak yang dilikuidasi oleh pemerintah. Bentuk hukum bank umum swasta nasional adalah Perseroan Terbatas (PT), termasuk di dalamnya Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN), yang telah merubah bentuk hukumnya menjadi PT tahun 1993.

4. Bank Swasta Asing adalah bank-bank umum swasta yang merupakan perwakilan (kantor cabang) bank-bank induknya di negara asalnya. Bank-bank asing ini menjelaskan fungsi sebagaimana layaknya bank-bank umum swasta nasional, dan mereka tunduk pula pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Bank Umum Campuran (*joint venture bank*) adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

### **II.2.1 Usaha Bank Umum**

Kegiatan usaha bank umum yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. Penghimpunan dana.
- b. Penyaluran atau penggunaan dana.
- c. Pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **A. Kegiatan Penghimpunan Dana**

Kegiatan usaha bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana antara lain dapat berupa :

- a. giro (*demand deposits*);
- b. deposito berjangka (*time deposits*);
- c. sertifikat deposito (*certificate of seposits*);
- d. tabungan (*saving deposits*);
- e. bentuk simpanan lainnya, misalnya *deposit on call*;

- f. menerbitkan atau menjual surat pengakuan utang, baik jangka pendek-misalnya wesel, promes (*promissory notes*) atau *commercial paper*, maupun jangka panjang misalnya obligasi (*bonds*);
- g. menerima pinjamandana dari bank lain (*interbank borrowing*);
- h. menjual surat berharga yang dimiliki dengan cara transaksi jual putus (*outright*) atau dengan janji membeli kembali (*repurchase agreement*);
- i. menerbitkan *Medium Tern Notes* (MTN) dan *Floating Rate Notes* (FRN); dan
- j. simpanan dalam rangka program pensiun (Dana Pensiun Lembaga Keuangan).

## **B. Kegiatan Penyaluran Dana**

Kegiatan usaha bank yang terkait dengan penyaluran dana kepada masyarakat atau pihak lain antara lain dapat berupa :

- a. pemberian kredit (*loan*) dengan sistem konvensional;
- b. menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- c. membeli surat-surat wesel termasuk ekseptasi bank (*broker's acceptance*);
- d. membeli surat pengakuan hutang jangka pendek misalnya *promissory notes*, akseptasi bank (*bankers's accetance*) wesel (*bill of exchange*), atau *commercial paper*;
- e. membeli surat berharga jangka panjang, misalnya obligasi korporasi (*corporate bonds*);
- f. membeli surat berharga dengan janji menjual kembali (*reverse repo*);
- g. menempatkan dana pada bank lain berupa *interbank call money*, *deposit on call*, deposito berjangka, dan sertifikat deposito;
- h. membeli Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*);
- i. membeli Obligasi Negara (*Treasury Bonds*);

- j. penempatan pada Bank Indonesia berupa Sertifikat Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), di samping untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum;
- k. memberikan pembiayaan anjak piutang;
- l. melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti : perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, modal ventura, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

### C. Penyediaan Jasa-jasa

Kelompok ketiga dari kegiatan bank umum adalah menyediakan jasa-jasa terutama dalam rangka lalu lintas pembayaran yang meliputi :

- a. pemindahan uang (*transfer* dana) baik secara manual maupun secara *on line* atau *electronic*;
- b. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (*collection*);
- c. menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga (*safety box*);
- d. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*custodian*);
- e. bertindak sebagai wali amanat (*trustee*);
- f. memberikan jaminan *letter of credit* (L/C);
- g. memberikan bank garansi;
- h. bertindak sebagai *sub registry* dalam perdagangan Obligasi Negara dengan izin Bank Indonesia;
- i. bertindak sebagai penanggung (*guarantor*) dalam penerbitan obligasi;
- j. memberikan pelayanan *financial advisory*;

- k. bertindak sebagai *arranger* dalam hal penerbitan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek (misalnya *commercial paper*);
- l. memberikan jasa pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut (*factoring*);
- m. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun;
- n. memberikan pelayanan penukaran uang (*money changer*);
- o. memberikan pelayanan dalam penarikan tunai atau pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu ATM (*automated Teller Machine*); kartu debit (*debit card*); kartu kredit (*credit card*)
- p. menerbitkan *draft*, yaitu surat perintah bayar tidak bersyarat yang diterbitkan bank kepada bank koresponden;
- q. menerbitkan cek perjalanan (*travelers's check*).

## **II.2.2 Penilaian Kesehatan Bank**

Definisi Kesehatan Bank menurut Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, Totok Budi Santoso (2006:51 adalah :

*“Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.”*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/10/2004 Tahun 2004 mengenai tingkat kesehatan perbankan adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi

rasio-rasio keuangan bank. Sedangkan penilaian kualitatif berkaitan dengan penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank.

### **II.2.3 Faktor Penilaian kesehatan Bank**

Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia menggunakan beberapa kriteria atau dikenal dengan analisis CAMELS (*Capital, Assets, Manajement, Earnings, Liquidity, Sensitivity to market risk*).

Unsur-unsur penilaian dalam analisis CAMELS adalah sebagai berikut :

1. *Capital* (Permodalan)
2. *Assets* (Kualitas asset)
3. *Management* (Manajemen)
4. *Earnings* (Rentabilitas)
5. *Liquidity* (Likuiditas);
6. *Sensitivity to Market Risk* (Sensitivitas terhadap risiko Pasar)

Unsur-unsur penilaian dalam analisis CAMELS dijelaskan sebagai berikut :

#### **A. *Capital* (Permodalan)**

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- *Ratio* (CAR) terhadap ketentuan yang berlaku;
- Komposisi permodalan;
- *Tren* ke depan dan proyeksi KPMM/CAR;
- Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank;

- Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan); Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) / *Capital Adequacy*
- Akses kepada sumber permodalan.
- Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

## **B. *Assets* (Kualitas aset)**

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif;
- Debitor inti diluar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit;
- Perkembangan aktiva produktif bermasalah (*nonperforming asset*) dibandingkan aktiva produktif;
- Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP);
- Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif;
- Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif;
- Dokumentasi aktiva produktif;
- Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

## **C. *Management* (Manajemen)**

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- Manajemen umum;
- Penerapan sistem manajemen resiko;

- Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

#### **D. *Earnings* (Rentabilitas)**

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- Pengembalian atas aktiva (*return on assets-ROA*);
- Pengembalian atas ekuitas (*return on equity-ROE*);
- Margin bunga bersih (*net interest margin-NIM*);
- Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO);
- Pertumbuhan laba operasional;
- Komposisi portopolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan;
- Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya;
- Prospek laba operasional.

#### **E. *Liquidity* (Likuiditas).**

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain :

- Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 bulan;
- *1-month maturity mismatch ratio*;
- Ratio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*loan to deposit ratio-LDR*);
- Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang;
- Ketergantungan pada dana antara bank dan deposito inti;
- Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management-ALMA*);

- Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya;
- Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

**F. *Sensitivity to Market Risk* (Sensitivitas terhadap risiko Pasar)**

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor *Sensitivity to Market Risk* dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian (*potensial loss*) sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga;
- Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar;
- Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

**II.3 Dana Pensiun Lembaga Keuangan(DPLK)**

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terdapat tiga jenis Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Kepesertaan dalam DPLK terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri.

Sesuai dengan definisinya, DPLK hanya dapat didirikan oleh bank dan perusahaan asuransi jiwa. Bank disini adalah bank umum sebagaimana dimaksud undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

### **II.3.1 Syarat Pendirian DPLK**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 802/KMK.01/1993, Pendirian DPLK harus mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Permohonan tersebut dilengkapi dengan peraturan dana pensiun dan program kerja yang diperlukan untuk bertindak sebagai Pengurus. Kesiapan perusahaan asuransi jiwa dan bank umum untuk menyelenggarakan DPLK dibuktikan dengan adanya kesiapan di bidang organisasi dan personil serta kesiapan sistim administrasi dan sistim pengolahan data yang mampu mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Dana Pensiun Lembaga Keuangan secara tertib dan efisien.

#### **A. Bank Umum**

Syarat Pendirian DPLK oleh bank umum adalah :

1. memenuhi tingkat kesehatan bank, dengan ketentuan :
  - a. selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat;
  - b. memenuhi ketentuan penyediaan modal minimum bank;
  - c. kualitas aktiva produktif dalam kategori sehat;
  - d. memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2. memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK;

3. menyanggupi untuk menyampaikan laporan tingkat kesehatan bank, baik secara keseluruhan maupun aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, dan pemenuhan BMPK, setiap triwulan.

Pengesahan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang didirikan oleh bank umum dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank.

## **B. Perusahaan Asuransi Jiwa**

Adapun Syarat pendirian DPLK oleh perusahaan asuransi jiwa adalah :

1. memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) triwulan terakhir;
2. memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
3. memiliki kinerja investasi yang sehat meliputi hasil yang memadai dari portofolio investasi dan penempatan investasi tidak menyimpang dari ketentuan tentang investasi yang berlaku di bidang perasuransian.
4. memiliki tingkat kesinambungan pertanggungan yang sehat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. menyanggupi untuk menyampaikan laporan hasil penilaian solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa dan laporan investasi Perusahaan Asuransi Jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha perasuransian setiap triwulan.

Pemenuhan tingkat kesinambungan pertanggungan yang sehat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan tingkat pembatalan pertanggungan yang belum mempunyai nilai tunai setinggi-tingginya 20% (dua puluh per seratus).

Tingkat pembatalan pertanggungan yang belum mempunyai nilai tunai adalah hasil perbandingan antara jumlah pembatalan pertanggungan yang belum mempunyai nilai tunai pada suatu tahun tertentu dengan jumlah pertanggungan baru dari tahun yang sama.

Pengesahan DPLK yang didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan instansi pengawas usaha perasuransian mengenai tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa dan ketaatan pada ketentuan tentang investasi.

#### **II.4 Penelitian Sebelumnya**

Potensi pasar lembaga keuangan masih sangat besar dan memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Bank Indonesia dalam upaya pengembangan produk syariah melakukan serangkaian penelitian mengenai potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di beberapa wilayah di Indonesia.

Penentuan wilayah yang berpotensi dilakukan dengan melakukan analisis potensi ekonomi yang mendukung kelangsungan usaha bank syariah dan wawancara untuk mengetahui persepsi konsumen atas produk bank syariah. Analisis atas potensi ekonomi dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap variabel demografi, ekonomi (penghasilan, status pekerjaan), nilai sosial dan sistem sosial.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk memperoleh data dan informasi dalam suatu kegiatan termasuk penelitian dan atau kajian diperlukan suatu langkah-langkah konkrit yang tertuang dalam beberapa cara/ metode dan hal ini lazim dinamakan Metodologi. Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan *Cara Ilmiah* untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan atau kegunaan tertentu. Dalam melakukan kegiatan studi/penelitian tentang **Potensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sebagai Penyelenggara Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)** ini, kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja yaitu melalui studi literatur/ kepustakaan, melakukan penyebaran kuesioner/ angket kepada beberapa responden yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan melakukan survei langsung ke lapangan dengan mendatangi dan melakukandan diskusi dan atau wawancara langsung dengan sebagian pelaku industri dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD) di berbagai wilayah selaku responden.

### **III.1. Jenis studi**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan survey (kuesioner/angket), studi kepustakaan/ literatur serta wawancara dan diskusi langsung dengan beberapa responden di lapangan. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya berdasarkan data dan informasi yang faktual.

Pelaksanaan dan penerapan metode penelitian deskriptif tidak terbatas sampai pada pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data, akan tetapi meliputi analisis dan interpretasi terhadap data dan informasi yang diperoleh, selain itu semua data dan informasi yang diperoleh/dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

### **III.2. Populasi dan Metode pengambilan sampel**

Populasi dalam penelitian/ studi ini adalah perusahaan daerah dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar diberbagai wilayah di seluruh Indonesia. Adapun jumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) hingga akhir tahun 2010 ini berjumlah 26 buah.

Mempertimbangkan bahwa populasi yang akan diteliti adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh wilayah Indonesia yang hingga saat ini jumlahnya tidak terlalu besar yaitu berjumlah 26 buah saja, untuk itu metode dan teknik sampling yang dianggap menjadi pilihan paling tepat digunakan dalam studi/kajian ini adalah dengan metode sensus. **Oleh karena penelitian ini menggunakan metode sensus atau *complete enumeration*, maka penelitian ini tidak menggunakan sampel sehingga teknik pengambilan sampel tidak diperlukan.**

Penilaian BPD yang berpotensi didasarkan atas penilaian terhadap dua indikator yaitu indikator internal dan indikator eksternal.

1. Indikator internal meliputi: a). niat BPD untuk mendirikan, b). rasio LDR diatas 80%, c).rasio CAR diatas 12% d). nilai BPL dibawah rata-rata industri dan e).rasio jumlah nasabah PNS dibawah 60%.

2. Indikator eksternal meliputi: a).PDRB, b). PDRB perkapita, c).Jumlah Penduduk, d). Jumlah usaha mikro/ industri kecil, menengah dan besar, e).Jumlah pekerja yang berpendidikan paling rendah SMA sederajat.

### **III.3. Metode pengumpulan data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim studi Potensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sebagai Penyelenggara Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), beberapa kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan dibawah ini.

#### **III.3.1. Studi pustaka**

Pendekatan ini diperlukan dalam upaya untuk pendalaman materi serta sebagai informasi pelengkap atas materi atau topik yang dijadikan penelitian. Data yang digunakan adalah data-data yang terkait dengan penelitian ini antara lain mengenai peraturan dan ketentuan yang terkait dengan kebijakan industri lembaga keuangan non bank khususnya industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Dalam studi pustaka juga dipelajari berbagai artikel atau tulisan perorangan dan institusi yang berkaitan dengan industri lembaga keuangan non bank khususnya industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Disamping itu dalam studi pustaka ini juga menggunakan beberapa literatur-literatur maupun hasil penelitian yang terkait dengan pengembangan industri lembaga keuangan serta melakukan kajian terbatas melalui situs-situs internet dan referensi lain yang berkaitan dengan seluk beluk industri sejenis DPLK di beberapa negara.

### **III.3.2. Studi lapangan**

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh masukan secara langsung dari BPD-BPD di daerah selaku responden yang dianggap dapat memberikan masukan secara langsung mengenai kondisi riil yang berkaitan dengan prospek industri/ kinerja DPLK dan kendala atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan industri DPLK di Indonesia. Untuk itu langkah-langkahnya adalah :

#### **III.3.2.1 Survey/ penyebaran kuesioner**

Survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner/ angket kepada BPD. Adapun dari 26 BPD yang dijadikan responden, 24 diantaranya dikirim kuesioner/ angket sedangkan yang 2 lainnya yaitu BPD Jateng dan BPD Jabar tidak dikirim angket/ kuesioner melainkan dikunjungi langsung dengan melakukan diskusi/ wawancara oleh anggota tim studi. Hal ini mengingat bahwa kedua BPD dimaksud merupakan BPD yang telah menyelenggarakan DPLK dan dianggap sudah berjalan dengan baik dan bahkan patut disebut sebagai barometer penyelenggaraan DPLK bagi BPD-BPD lainnya yang belum menyelenggarakan DPLK.

Tujuan penyebaran kuesioner ini adalah untuk memperoleh masukan langsung berupa informasi data dan juga jenis/ bentuk keseriusan dan atau minat dan BPD dalam menyelenggarakan kegiatan DPLK termasuk keberatan dan kendala yang dihadapi serta hal-hal lain yang melatarbelakangi minat dan kesiapan BPD untuk menyelenggarakan kegiatan DPLK dimaksud.

#### **III.3.2.2 Wawancara langsung**

Selain melakukan penyebaran kuesioner sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam studi lapangan ini anggota tim studi juga melakukan wawancara langsung

dengan beberapa BPD selaku responden yang berada di berbagai wilayah di Indonesia yaitu : **BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Barat, BPD Nusa Tenggara Timur/ Lombok dan BPD Jawa Barat serta BPD Jawa Tengah.** 2 BPD yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan BPD yang telah menyelenggarakan DPLK dan dianggap sudah berjalan dengan baik dan bahkan sebagai contoh dan tolok ukur bagi BPD-BPD lainnya yang belum menyelenggarakan DPLK.

Dalam proses tanya-jawab dengan responden yang berlangsung secara lisan ini dilakukan dengan tatap muka dua orang atau lebih, lalu mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan oleh responden kemudian dicatat dan diinterpretasikan selanjutnya dibuatkan narasinya dan dimasukkan dalam laporan akhir studi. Tujuan wawancara ialah semata-mata untuk mengumpulkan informasi yang faktual dan bukan untuk mengubah atau memengaruhi suatu pendapat dari responden.

#### **III.4. Jenis dan sumber data**

Adapun data yang dipakai dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui diskusi dan wawancara langsung dengan beberapa responden di lapangan yaitu beberapa BPD yang berlokasi masing-masing di Medan, Palembang, Bandung, Semarang dan Lombok.

Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, penelusuran dan eksplorasi melalui media internet serta data dan informasi yang diperoleh melalui publikasi yang diterbitkan oleh lembaga dalam negeri maupun luar negeri seperti BPS, Bank Indonesia, Majalah Investor, Majalah Infobank termasuk hasil studi tahun-tahun sebelumnya dari berbagai pihak yang ada relevansinya serta dari hasil studi lapangan

melalui penyebaran angket/kuesioner kepada sebagian BPD selaku responden dalam kajian ini.

### **III.5. Metode Analisis**

Analisis data merupakan usaha untuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dan informasi yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu diskusi dengan rekan-rekan sesama anggota tim maupun dengan pimpinan, wawancara dengan sebagian responden yang sudah ditulis dalam catatan, hasil tabulasi dari kuesioner/ angket, dokumen pendukung lainnya, gambar foto dan tabel dan lainnya.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam menentukan potensi internal dan potensi eksternal dilakukan dalam dua tahapan yaitu:

1. BPD yang berpotensi ditentukan jika telah memenuhi paling sedikit 3 variabel dari 5 variabel berdasarkan indikator yang ditetapkan.
2. BPD yang berpotensi ditentukan dengan kondisi jika dan hanya jika memiliki potensi berdasarkan indikator internal dan indikator eksternal.

Sedangkan untuk mengetahui aspek yang mempengaruhi keputusan BPD untuk mendirikan atau TIDAK mendirikan DPLK digunakan metode skoring.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS**

Analisis potensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap Indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal yang digunakan seperti yang telah ditetapkan pada Bab III antara lain LDR, CAR, NPL, niat mendirikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun kedepan, jumlah pekerja formal. Indikator eskternal yang digunakan adalah PDRB, PDRB per kapita, Jumlah Penduduk, Jumlah industri (SUSENAS), Pekerja berpendidikan paling rendah SMA.

#### **IV.1 Potensi berdasarkan indikator internal**

Analisis terhadap variabel internal dilakukan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan. Kondisi internal yang baik dibutuhkan sebagai syarat utama dalam pendirian DPLK. Aspek internal mencakup dua aspek penting. Pertama, aspek keuangan yang diwakili dengan variabel CAR, LDR dan NPL. Kedua, aspek operasional yang diwakili dengan variabel rasio nasabah PNS dan Niat mendirikan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi yang dimiliki BPD berdasarkan indikator internal, perlu juga diketahui dukungan infrastruktur bank yang dapat dipergunakan dalam mendukung operasional DPLK.

#### **IV.1.1 Aspek Keuangan**

Salah satu alat ukur tingkat kesehatan BPD adalah CAR. Rasio CAR menunjukkan kecukupan modal bank. Bank sehat harus didukung dengan modal yang cukup. Peraturan Bank Indonesia mewajibkan setiap bank yang beroperasi memiliki rasio CAR sebesar 8 persen tetapi agar dapat mengimbangi kebutuhan operasional diperlukan rasio CAR sebesar 12 -13 persen . Rasio sebesar 12 persen merupakan level yang dianggap aman oleh mayoritas bank.

Data 24 BPD menunjukkan seluruh bank sepanjang tahun 2008 dan 2009 memiliki rasio CAR diatas 12 persen. Rasio CAR tertinggi pada tahun 2009 mencapai 41,22 persen dan terendah sebesar 12,27 persen. Rata rata rasio CAR kelompok BPD sebesar 19,56 persen pada tahun 2009. Tingginya rasio CAR kelompok BPD tidak didukung oleh pertumbuhan modal yang baik. Pertumbuhan modal tahun 2009 secara rerata mengalami penurunan sebesar 12 persen (-12 persen) jika dibandingkan dengan rerata modal tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memberikan sinyal akan perlunya kebutuhan modal tambahan dalam jangka menengah sekaligus meningkatkan kebutuhan akan ketersediaan dana murah seperti yang dapat disediakan oleh DPLK.

Rasio CAR sebesar 12 persen selama 2 tahun terakhir ditambah kebutuhan modal yang meningkat di masa depan menunjukkan semua bank pada kelompok BPD memiliki potensi sebagai pendiri DPLK.

Tabel 4.1 menampilkan nilai LDR kelompok BPD tahun 2008 sampai 2009. Rata-rata LDR kelompok BPD tahun 2009 sebesar 70,92 persen menurun 5,06 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 terdapat 13 Bank yang memiliki rasio LDR diatas 80 persen. Perubahan jumlah Bank yang memiliki nilai LDR diatas 80 persen mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi Sembilan Bank.

**Tabel 2 Loan to Deposit Ratio (persen) Kelompok BPD tahun 2008 dan 2009**

N	Nama BPD	2008	2009	No	Nama BPD	2008	2009
1	Bengkulu	69.12	117.41	14	Sulawesi Utara	112.99	69.89
2	N T B	128.48	102.60	15	DI Yogyakarta	75.49	68.09
3	Bali	90.4	91.86	16	Sulawesi Tengah	85.89	64.02
4	Sulawesi Selatan	114.80	91.63	17	Kalimantan Barat	46.64	62.23
5	Lampung	109.32	90.32	18	Sumsel Babel	53.39	58.42
6	N T T	111	88.00	19	DKI Jakarta	66.98	57.31
7	Jambi	89.08	85.80	20	Riau	43.24	54.10
8	Sumatera Barat	93.01	84.35	21	Kalimantan Selatan	54.08	53.85
9	Sumatera Utara	84.13	81.42	22	Jawa Timur	54.04	51.70
10	Jawa Tengah	102.12	79.76	23	N A D	30.54	50.83
11	Jawa Barat	89.44	79.05	24	Kalimantan Tengah	50.73	47.57
12	Maluku	69.57	73.87	25	Kalimantan Timur	33.68	42.57
13	Sulawesi Utara	88.74	71.51	26	Papua	28.43	25.65

Sumber: BI, Majalah Infobank

Penilaian potensi Bank dengan menggunakan variabel LDR mensyaratkan nilai 80 persen selama masa penilaian yaitu tahun 2008 dan 2009. Perhitungan yang dilakukan menghasilkan 8 Bank yang memenuhi persyaratan tersebut. Bank tersebut merupakan perusahaan pada daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Lampung dan Nusa Tenggara Barat.

Pemberian kredit oleh bank tentu saja harus dibarengi dengan tingkat kolektibilitas yang baik pula. Nilai NPL yang semakin kecil menandakan kolektibilitas dana kredit yang semakin baik. Rata-rata NPL yang kelompok BPD selama tahun 2008 dan 2009 berada pada kisaran 2,1 sampai dengan 2,4 persen. Penetapan kriteria bank berpotensi dengan nilai NPL dibawah rata-rata kelompok BPD selama dua tahun diharapkan dapat memberikan gambaran yang relatif nyata mengenai tingkat kesehatan bank dan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Berdasarkan kriteria yang diberikan terdapat 17 BPD yang memiliki rasio NPL dibawah rata-rata industri selama tahun 2008 dan 2009. Kondisi ini menunjukkan

mayoritas BPD memiliki tingkat kehati-hatian yang baik dalam penyaluran kredit pada masyarakat.

#### IV.1.2 Aspek Operasional

Potensi pasar DPLK erat kaitannya dengan jumlah pekerja yang memiliki status pekerjaan sebagai buruh, karyawan atau pegawai<sup>1</sup>. Status pekerjaan tersebut memberikan mereka sejumlah penghasilan yang tetap setiap bulannya dan mendorong mereka untuk menyisihkan penghasilan yang mereka peroleh agar dapat dipakai nanti pada saat pensiun. Penelitian mengenai tipologi peserta DPLK (2009) menunjukkan mayoritas peserta DPLK adalah pekerja di sektor formal terutama karyawan swasta.

Pemegang saham Bank pada kelompok BPD mayoritas adalah pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Bukanlah hal yang aneh bila pemerintah setempat mendorong pegawai negeri di daerahnya menjadi nasabah pada BPD. Disisi lain pegawai negeri telah memiliki program pensiun yang dikelola oleh PT.TASPEN.

Penilaian potensi Bank melalui variabel rasio PNS menetapkan bahwa semakin besar jumlah nasabah yang memiliki status PNS maka semakin kecil potensi bagi program pensiun. Berdasarkan data kuesioner yang diterima, dari 17 BPD terdapat 8 BPD yang memiliki rasio nasabah PNS kurang dari 60 persen. BPD tersebut merupakan Bank yang beroperasi di daerah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Papua.

---

<sup>1</sup>Definisi baku **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu. (BPS, SAKERNAS).

Analisa potensi berdasarkan variabel ”niat mendirikan DPLK” ditujukan untuk mengukur sejauh mana kesediaan dari BPD dalam mendirikan DPLK. Dari hasil kuesioner yang disampaikan terdapat 11 BPD yang memiliki niat untuk mendirikan DPLK. BPD yang berniat terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berniat mendirikan dalam jangka waktu 2 sampai 5 tahun kedepan. Kelompok kedua berniat mendirikan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun yang akan datang.

Penilaian potensi BPD didasarkan pada niat mendirikan DPLK dalam jangka kurang dari 5 tahun. Jangka waktu lebih dari 5 tahun dinilai tidak realistis dalam pendirian suatu perusahaan. Berdasarkan kriteria tersebut terdapat 8 BPD yang berniat mendirikan DPLK dalam kurung waktu kurang dari 5 tahun. BPD tersebut terdapat pada provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, DKI Jakarta, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua.

**Tabel 3 Wilayah yang berpotensi berdasarkan Indikator Internal**

No	Provinsi/Province	LDR	NPL	Rasio PNS	CAR	Niat	Nilai Total
1	Aceh	0	1	0	1	0	2
2	Sumatera Utara	1	1	0	1	1	4
3	Sumatera Barat	1	0	1	1	0	3
4	Riau	0	1	0	1	1	3
5	Jambi	1	1	0	1	1	4
6	Sumatera Selatan	0	0	1	1	0	2
7	Bengkulu	0	1	1	1	0	3
8	Lampung	1	1	0	1	0	3
9	DKI Jakarta	0	0	0	1	1	2
10	DI Yogyakarta	0	1	1	1	0	3
11	Jawa Timur	0	1	0	1	0	2
12	Bali	1	1	0	1	0	3
13	Nusa Tenggara Barat	1	0	1	1	1	4
14	Nusa Tenggara Timur	1	1	0	1	0	3
15	Kalimantan Barat	0	1	1	1	1	4
16	Kalimantan Tengah	0	0	0	1	0	1
17	Kalimantan Selatan	0	1	0	1	1	3
18	Kalimantan Timur	0	1	1	1	0	3
19	Sulawesi Utara	0	0	0	1	0	1
20	Sulawesi Tengah	0	0	0	1	0	1
21	Sulawesi Selatan	1	0	0	1	0	2
22	Sulawesi Tenggara	0	1	0	1	0	2
23	Maluku	0	0	0	1	0	1
24	Papua	0	1	1	1	1	4
Berpotensi		8	15	8	24	8	14
TIDAK Berpotensi		15	9	15	0	15	10

Sumber: hasil pengolahan data

Kombinasi dari kelima variabel yang terkandung dalam indikator internal memberikan penilaian menyeluruh dari seluruh aspek yang dinilai. BPD yang dianggap berpotensi diharapkan memenuhi 3 dari 5 variabel yang telah ditetapkan sebelumnya. Perhitungan berdasarkan variabel tersebut menghasilkan 14 BPD yang memiliki potensi. Dari 14 BPD tersebut, terdapat 5 BPD dapat memenuhi 4 variabel yaitu BPD yang didirikan oleh provinsi Sumatera Utara, Jambi, NTB, Kalimantan Barat dan Papua.

#### **IV.1.3 Dukungan Infrastruktur**

Operasional DPLK membutuhkan dukungan sistem informasi yang baik. Penilaian mengenai dukungan infrastruktur dilakukan melalui pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Pertanyaan no 13-14 menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan faktor yang berhubungan pada kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi yaitu "*Dari segi Sistem, apakah Sistem Informasi Bank yang dimiliki BPD dapat melakukan administrasi rekening secara individu*" dan "*Apakah system Informasi yang dimiliki Bank telah online antara Kantor Pusat dengan seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu*". Adapun hal yang menjadi latar belakang pertanyaan tersebut adalah dengan dimilikinya sistem yang dapat memisahkan rekening tiap individu maka otomatis juga dapat dengan mudah mengaplikasikan administrasi individu pada DPLK. Pertanyaan no.14 dimaksudkan untuk melihat apakah nantinya setiap nasabah DPLK dapat menyetorkan dananya di tempat terdekat.

Dalam kuesioner yang kami kirimkan kami mendapatkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4 Dukungan Sistem Informasi pada Operasional BPD**

Nama BPD	Rek Individu	Online Sistem
B P D YOGYAKARTA	ya	ya
BPD KALIMANTAN TIMUR	ya	ya
PD. BPD KALIMANTAN SELATAN	ya	ya
PT BPD BENGKULU	ya	ya
PT. BANK BPD ACEH	ya	ya
PT. BANK DKI	ya	ya
PT. BANK LAMPUNG	ya	ya
PT. BPD BALI	ya	ya
PT. BPD JAMBI	ya	ya
PT. BPD KALIMANTAN BARAT	ya	ya
PT. BPD KALTENG	ya	ya
PT. BPD NUSA TENGGARA BARAT	ya	ya
PT. BPD PAPUA	ya	ya
PT. BPD RIAU	ya	ya
PT. BPD SUMATERA BARAT	ya	ya
PT. BPD SUMATERA SELATAN & BAI	ya	ya
PT. BPD SUMATERA UTARA	ya	ya

Sumber: kuesioner, diolah

Atas dasar kedua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat ini jika dilihat dari sisi kesiapan infrastruktur pendukung dalam mendirikan DPLK telah dipenuhi oleh seluruh responden atau dengan kata lain, seluruh BPD telah siap menjalankan fungsi sebagai DPLK jika dilihat dari sisi Teknologi Informasi yang dapat mendukung pelayanan dalam menerima dana masyarakat telah terpenuhi.

#### IV.1.4 Kesiapan SDM

Kegiatan operasional DPLK akan dijalankan oleh SDM yang kemungkinan besar berasal dari pegawai yang telah bekerja pada BPD. Untuk mengetahui kesiapan SDM diajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama berbunyi *“Apakah Bank memiliki analis yang menguasai investasi di Pasar Modal?”* . Pertanyaan kedua berbunyi *“Apakah Bank memiliki tenaga pemasaran yang mampu menjelaskan produk investasi?”*. Pertanyaan pertama ingin menangkap apakah saat ini terdapat pegawai yang menguasai seluk beluk investasi di luar produk perbankan sehingga nantinya dapat memberikan imbal hasil yang kompetitif dalam mengelola dana yang dititipkan

pada DPLK. Peraturan dalam mengelola DPLK tidak melarang pengelola untuk berinvestasi di luar produk perbankan (deposito) yang relatif tidak memiliki resiko, tetapi jika terus berkuat pada produk perbankan maka imbal hasilnya pun tidak akan maksimal.

Pertanyaan kedua ingin mengetahui apakah responden memiliki pengalaman dalam memasarkan produk investasi selain produk perbankan. Tenaga pemasaran memegang peranan penting dalam berkembangnya suatu produk dan tidak terkecuali produk investasi. DPLK selain merupakan produk yang memberi jaminan pada masa tidak produktif, juga merupakan produk investasi yang memerlukan pengetahuan khusus. Meskipun peraturan tentang pengelolaan DPLK ini telah mengatur agar dana dikelola sebaik mungkin, tidak menutup kemungkinan bahwa dana mereka tidak akan mengalami kerugian ekonomis (*opportunity cost*), atau tidak seperti tabungan yang dapat diambil kapanpun tanpa potongan dan sebagainya.

Dari kedua pertanyaan ini hanya 1 dari 17 atau 5,9 persen responden yang memiliki analis yang menguasai investasi di pasar modal dan yang mampu menjelaskan produk investasi yaitu BPD Sumatera Selatan dan Babel.

#### **IV.2 Potensi berdasarkan indikator Eksternal**

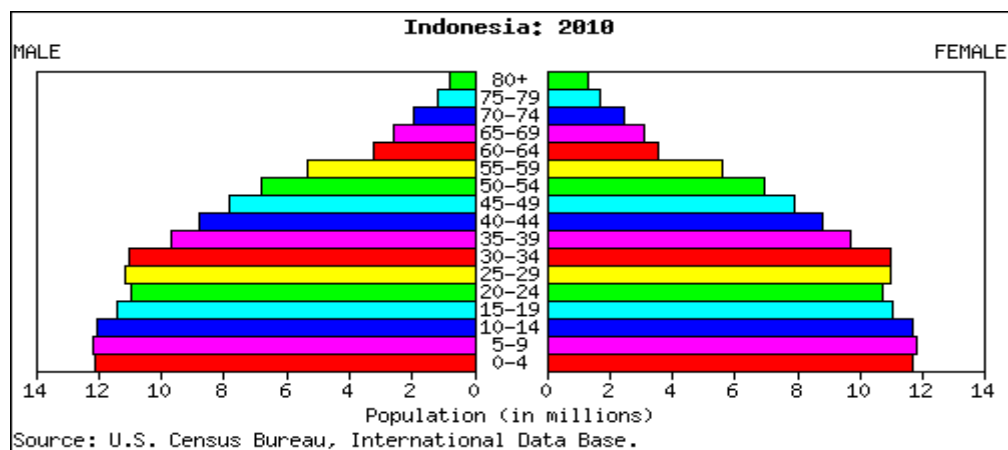
Analisis potensi berdasarkan indikator eksternal dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder terkait dengan demografi, pelaku ekonomi dan perkembangan ekonomi lokal. Tujuan analisis yang diharapkan adalah untuk melihat gambaran umum potensi ekonomi provinsi yang ada di Indonesia dalam hal menerima kehadiran DPLK baru. Penilaian dilakukan dengan mencari 10 daerah yang memiliki nilai terbesar. Provinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah tidak diikuti sertakan

dalam perhitungan dengan pertimbangan bahwa BPD di daerah tersebut telah memiliki DPLK.

#### IV.2.1 Demografi.

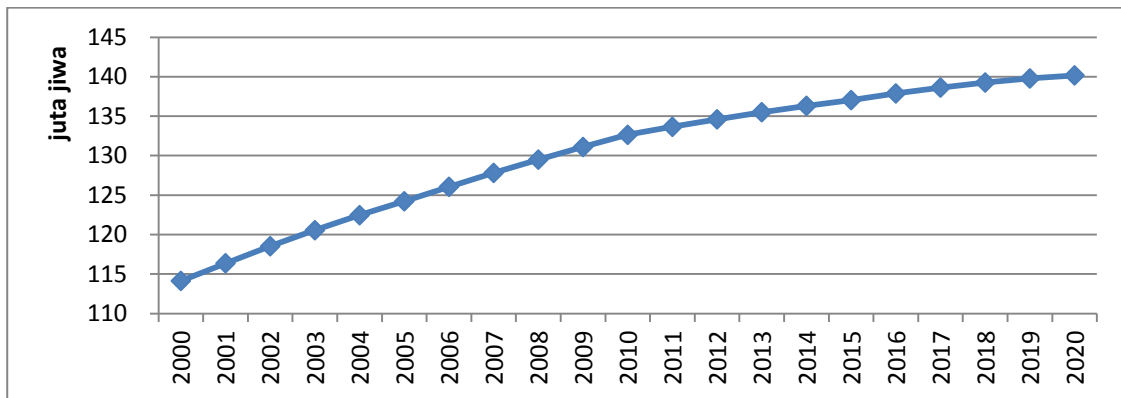
Piramida penduduk Indonesia tahun 2010 menggambarkan bentuk piramida yang cembung di tengah yang berarti konsentrasi penduduk berada pada usia produktif. Perbandingan komposisi usia penduduk 15 sampai dengan 49 tahun mencapai lebih dari 50 persen dari total penduduk Indonesia.

Grafik 1 Piramida Penduduk Indonesia 2010



Jumlah penduduk pada kelompok usia ini akan terus meningkat. Proyeksi penduduk sampai tahun 2020 menunjukkan trend peningkatan yang masih akan terus berlanjut melampaui tahun 2020. Hal ini menunjukkan tersedianya waktu yang relatif panjang untuk melakukan pemupukan dana melalui iuran pensiun.

**Grafik 2 Proyeksi Penduduk Usia 15-49**



sumber: [www.datastatistik.com](http://www.datastatistik.com)

Proyeksi penduduk usia 0-14 tahun juga mengalami peningkatan. Dari sisi pengembangan program pensiun, kelompok usia 0-14 tahun merupakan pasar potensial yang kelak akan ikut serta memberikan kontribusi iuran pada program pensiun.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama sepuluh tahun terakhir adalah sebesar 1,49 persen. Sepuluh provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar selain Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Jumlah penduduk yang besar mampu menggambarkan potensi yang besar bagi pemasaran suatu produk. Kondisi tersebut berlaku juga bagi DPLK. Sepuluh provinsi selain Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 memenuhi kriteria potensi berdasarkan indikator eksternal.

#### IV.2.2 Pelaku Ekonomi lokal

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah membutuhkan dua syarat utama. Pertama daerah tersebut harus mampu dan berhasil dalam memasarkan produk (barang dan jasa) ke wilayah lain dalam suatu negara atau ekspor ke luar negeri. Kedua, penerimaan ekspor itu harus menghasilkan dampak ganda (*multiplier effect*) atau perputaran tambahan pendapatan dalam perekonomian lokal, minimal melalui pembelian faktor produksi dan pengeluaran rumah tangga terhadap barang konsumen oleh segenap aktor ekonomi yang terlibat dalam aktivitas produksi dan ekspor.

**Tabel 5 Jumlah Usaha Mikro, Perusahaan Kecil, Menengah dan Besar**

Provinsi	Jumlah Perusahaan	persentase	Provinsi	Jumlah Perusahaan	persentase
Jawa Barat	5.045.473	22,27%	Bali	376.313	1,66%
Jawa Timur	4.201.395	18,54%	Aceh	368.192	1,63%
Jawa Tengah	3.683.139	16,26%	Sulawesi Utara	354.153	1,56%
DKI Jakarta	1.122.873	4,96%	NTT	286.601	1,26%
Sumatera Utara	1.052.203	4,64%	Kalimantan Timur	273.194	1,21%
Sulawesi Selatan	836.000	3,69%	Kalimantan Barat	243.668	1,08%
Lampung	640.369	2,83%	Jambi	234.340	1,03%
Sumatera Selatan	618.494	2,73%	Sulawesi Tenggara	198.293	0,88%
NTB	543.051	2,40%	Sulawesi Tengah	193.103	0,85%
Sumatera Barat	499.716	2,21%	Kalimantan Tengah	184.980	0,82%
Riau	463.776	2,05%	Papua	159.130	0,70%
DI Yogyakarta	401.966	1,77%	Maluku	141.488	0,62%
Kalimantan Selatan	393.734	1,74%	Bengkulu	141.070	0,62%
<b>Total</b>				<b>22.656.714</b>	<b>100</b>

Sumber. BPS, Hasil SUSENAS 2006

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi lokal memegang peranan penting untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Perusahaan dalam pengertian ini mencakup usaha mikro, perusahaan skala kecil, menengah dan besar. Berdasarkan data hasil sensus ekonomi 2006 terdapat 22,6 juta pelaku ekonomi yang tersebar di 33 provinsi seluruh Indonesia. Sepuluh daerah yang memiliki jumlah pelaku ekonomi

lokal paling banyak adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, NTB, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Variabel tingkat pendidikan digunakan untuk mengukur jumlah pekerja berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang dimilikinya. Salah satu karakteristik peserta DPLK berdasarkan hasil penelitian mengenai tipologi peserta DPLK (2009) adalah berpendidikan minimal SMA. Berdasarkan data Survey Angkatan Kerja Nasional pada bulan Agustus 2009, sepuluh provinsi yang memiliki pekerja terbanyak dengan pendidikan paling rendah SMA adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan.

#### **IV.2.3 Perkembangan ekonomi lokal**

Indikator potensi ekonomi wilayah didasarkan pada pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan PDRB suatu wilayah merupakan tanda terjadinya perbaikan dalam perekonomian regional daerah tersebut. Perbandingan PDRB tahun ini dengan tahun sebelumnya dinyatakan dalam laju pertumbuhan PDRB. Tabel 5 menggambarkan laju pertumbuhan PDRB provinsi berdasarkan harga konstan 2000 untuk tahun 2009 dan 2008. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2009 dialami oleh provinsi Papua dan terendah dialami oleh Provinsi Aceh.

Sepuluh daerah yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2009 adalah Papua, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jambi, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah. Beberapa provinsi baru seperti Sulawesi Barat, Papua Barat dan Maluku Utara yang juga memiliki laju pertumbuhan tinggi tidak diikutsertakan dalam penilaian karena tidak memiliki BPD.

Sementara itu pada tahun 2008, sepuluh daerah yang mencatat laju pertumbuhan PDRB tanpa migas tertinggi adalah Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

**Tabel 6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000, 2009**

Provinsi <i>Province</i>	Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i> (triliun Rp/trillion Rp)		Laju Pertumbuhan Ekonomi <i>GRDP growth rate</i> (persen/percent)	
	Migas <i>Oil and Gas</i>	Tanpa Migas <i>Non-oil and Gas</i>	Migas <i>Oil and Gas</i>	Tanpa Migas <i>Non-oil and Gas</i>
Aceh	32,2	27,5	-5,58	3,92
Sumatera Utara	111,6	110,9	5,07	5,14
Sumatera Barat	36,5	36,5	4,16	4,16
Riau	93,7	45,3	2,90	6,44
Kep. Riau	38,3	36,6	3,51	3,65
Jambi	16,3	14,7	6,37	6,90
Sumatera Selatan	60,4	47,0	4,10	5,05
Kep. Bangka Belitung	10,2	10,1	3,53	3,77
Bengkulu	7,7	7,7	4,04	4,04
Lampung	36,2	35,8	5,07	5,33
DKI Jakarta	371,4	370,5	5,01	5,03
Jawa Barat	302,6	293,5	4,29	4,20
Banten	72,0	72,0	4,69	4,69
Jawa Tengah	175,7	165,2	4,71	5,20
DI Yogyakarta	20,1	20,1	4,39	4,39
Jawa Timur	320,2	318,9	5,01	4,94
Bali	26,2	26,2	5,33	5,33
Nusa Tenggara Barat	18,3	18,3	8,99	8,99
Nusa Tenggara Timur	11,9	11,9	4,24	4,24
Kalimantan Barat	29,0	29,0	4,76	4,76
Kalimantan Tengah	17,6	17,6	5,48	5,48
Kalimantan Selatan	28,9	28,5	5,01	5,11
Kalimantan Timur	105,5	59,5	2,32	6,36
Sulawesi Utara	16,6	16,6	7,85	7,83
Gorontalo	2,7	2,7	7,54	7,54
Sulawesi Tengah	15,9	15,6	7,66	7,67
Sulawesi Selatan	47,3	47,2	6,20	6,20
Sulawesi Barat	4,1	4,1	6,03	6,03
Sulawesi Tenggara	10,8	10,8	7,57	7,57
Maluku	4,0	4,0	5,43	5,44
Maluku Utara	2,8	2,8	6,02	6,02
Papua	22,9	22,9	20,34	20,34
Papua Barat	6,8	5,3	6,26	7,36
<b>Total PDRB/Total GRDP</b>	<b>2 076,5</b>	<b>1 935,3</b>	<b>4,65</b>	<b>5,21</b>

Sumber/Source: BPS

Daerah potensial bagi pendirian DPLK merupakan daerah peringkat sepuluh besar yang memiliki laju pertumbuhan PDRB tertinggi selama 2 tahun. Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 7 provinsi yang memiliki laju pertumbuhan PDRB tertinggi selama 2 tahun berturut-turut. Daerah atau provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan

Timur, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Indikator PDRB perkapita mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat di suatu wilayah pada periode tertentu. Sepuluh daerah yang memiliki PDRB perkapita tertinggi pada tahun 2008 adalah Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Riau, Papua, Sumatera Selatan, NAD, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat.

Kombinasi antar variabel yang terdapat pada indikator eksternal menghasilkan 8 daerah yang memenuhi paling sedikit 3 variabel. Daerah tersebut adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

**Tabel 7 Peta potensi berdasarkan indikator eksternal**

No	Provinsi/Province	PDRB	PDRB Perkapita	Jlh Penduduk	Jlh Industri	Jlh SLTA keatas	Nilai Total
1	Aceh	0	1	0	0	0	1
2	Sumatera Utara	0	1	1	1	1	4
3	Sumatera Barat	0	1	1	1	1	4
4	Riau	1	1	1	1	1	5
5	Jambi	1	0	0	0	0	1
6	Sumatera Selatan	0	1	1	1	1	4
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	1	1	1	3
9	DKI Jakarta	0	1	1	1	1	4
10	DI Yogyakarta	0	0	0	1	1	2
11	Jawa Timur	0	1	1	1	1	4
12	Bali	0	0	0	0	1	1
13	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	1	0	2
14	Nusa Tenggara Timur	0	0	1	0	0	1
15	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0
16	Kalimantan Tengah	0	1	0	0	0	1
17	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Timur	1	1	0	0	0	2
19	Sulawesi Utara	1	0	0	0	0	1
20	Sulawesi Tengah	1	0	0	0	0	1
21	Sulawesi Selatan	1	0	1	1	1	4
22	Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	0	1
23	Maluku	0	0	0	0	0	0
24	Papua	0	1	0	0	0	1
Berpotensi		7	10	10	10	10	8
TIDAK Berpotensi		16	14	13	13	13	15

Sumber: hasil pengolahan data

Analisis secara komprehensif terhadap indikator internal dan eksternal menghasilkan potensi pendirian DPLK menurut lokasi. Secara relatif, wilayah yang memiliki potensi pendirian DPLK adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Lampung. Walaupun memiliki potensi berdasarkan indikator gabungan yang telah ditetapkan, BPD Sumatera Barat dan BPD Lampung tidak memenuhi variabel niat mendirikan sehingga secara keseluruhan tinggal dua BPD yang berpotensi dan memiliki niat untuk mendirikan DPLK yaitu BPD Sumatera Utara dan BPD Riau.

**Tabel 8 Gabungan Indikator internal dan eksternal**

No	Provinsi	Indikator Eksternal	Indikator Internal	Nilai Akhir	No	Provinsi	Indikator Eksternal	Indikator Internal	Nilai Akhir
1	Aceh	0	0	0	13	NTB	0	1	0
2	Sumatera Utara	1	1	1	14	NTT	0	1	0
3	Sumatera Barat	1	1	1	15	Kalimantan Barat	0	1	0
4	Riau	1	1	1	16	Kalimantan Tengah	0	0	0
5	Jambi	0	1	0	17	Kalimantan Selatan	0	1	0
6	Sumatera Selatan	1	0	0	18	Kalimantan Timur	0	1	0
7	Bengkulu	0	1	0	19	Sulawesi Utara	0	0	0
8	Lampung	1	1	1	20	Sulawesi Tengah	0	0	0
9	DKI Jakarta	1	0	0	21	Sulawesi Selatan	1	0	0
10	DI Yogyakarta	0	1	0	22	Sulawesi Tenggara	0	0	0
11	Jawa Timur	1	0	0	23	Maluku	0	0	0
12	Bali	0	1	0	24	Papua	0	1	0
Berpotensi		7	8	4			1	6	0
TIDAK Berpotensi		4	3	8			10	6	12

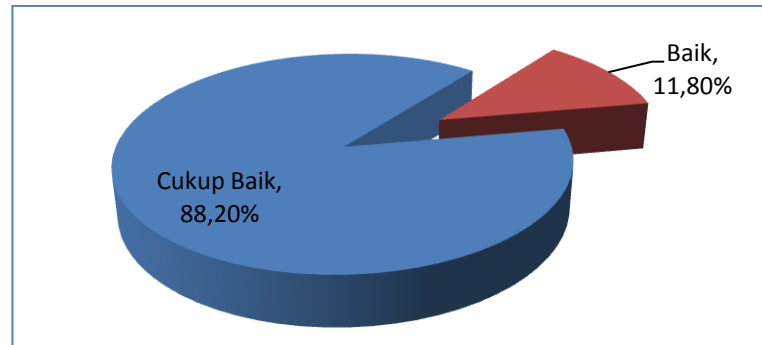
Sumber: hasil pengolahan data

### IV.3 Pemahaman dan aspek-aspek yang mempengaruhi keputusan BPD

Grafik 4.1 dibawah ini memperlihatkan gambaran mengenai pemahaman responden mengenai industri DPLK. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk

memberikan gambaran mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh direksi mengenai DPLK sehingga diharapkan dapat melihat peluang yang terdapat di daerahnya sendiri.

**Grafik 3 Pemahaman terhadap industri DPLK**



Sumber: kuesioner, diolah

Pilihan jawaban pada saat pembuatan kuesioner dikondisikan pada jawaban “Baik” dan “Cukup baik” dengan maksud agar responden tidak menjawab “ragu-ragu” atau “setengah mengerti” sehingga jawaban awal yang kami harapkan adalah sebagian besar responden akan menjawab “Baik”. Harapan tersebut didasarkan oleh dua alasan. Pertama, sebagian besar BPD memiliki program pensiun bagi karyawannya sendiri yang dikenal dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Kedua, program pensiun telah lama dikenal dalam industri keuangan bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional dan juga diakui memiliki kontribusi yang signifikan pada pembangunan suatu Negara. Pemahaman yang baik mengenai industri oleh responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang lebih obyektif dalam melihat kelebihan dan kekurangan yang ada dalam industri ini untuk selanjutnya mengambil keputusan akan menggeluti industri ini atau tidak.

Dari hasil kuesioner yang diperoleh dapat terlihat bahwa hanya 11,8% atau 2 responden dari total 17 responden yang mengenal dengan “Baik” industri ini, dengan

demikian dapat diartikan bahwa memang masih perlu banyak sosialisasi dan dorongan dari regulator agar BPD memiliki pengetahuan yang cukup di industri ini.

Untuk mendalami keputusan BPD dalam mendirikan atau tidak mendirikan DPLK, penelitian menyebarkan kuesioner kepada 24 BPD yang menjadi responden. Jumlah BPD yang mengembalikan kuesioner dan mengisi dengan baik sebanyak 17 BPD (70 persen). Bentuk lengkap kuesioner dapat dilihat pada lampiran I.

Kuesioner digunakan untuk menilai faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi keputusan BPD untuk mendirikan atau tidak mendirikan DPLK. Analisis data menggunakan skala Linkert dengan *range* angka 1 sampai dengan angka 7, dimana angka 1 berarti "sangat tidak penting" dan angka 7 berarti "sangat penting".

Dalam menilai seberapa kuat faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan BPD untuk mendirikan DPLK, digunakan 3 kelompok *support* yang merupakan rata-rata dari jawaban seluruh responden yaitu terdiri dari *support* bentuk lemah bilamana rata-rata jawaban berada di bawah angka 2,5, *support* bentuk sedang/menengah bilamana rata-rata jawaban berada di antara angka 2,5 namun dibawah angka 5,5, sedangkan untuk *support* bentuk sangat kuat nilai rata-rata berada di atas angka 5,5.

**Tabel 9 Aspek yang mempengaruhi keputusan untuk mendirikan DPLK**

Aspek yang mempengaruhi	Hasil Analisis
a. meningkatkan pendapatan Bank	<b>Support bentuk sedang</b> , nilai rata-rata sebesar 5,55. Terdapat 5 responden memilih angka 5 ke bawah.
b. meningkatkan posisi dana kelolaan	<b>Support bentuk kuat</b> , nilai rata-rata dari jawaban 5,91. Terdapat 4 responden memilih angka 5 ke bawah
c. meningkatkan profil ( <i>image</i> ) Bank	<b>Support bentuk kuat</b> , nilai rata-rata dari jawaban 5,82. Terdapat 4 responden memilih angka 5 ke bawah
d. mendukung pemasaran produk Bank untuk menarik nasabah baru	<b>Support bentuk kuat</b> , nilai rata-rata dari jawaban 6. Terdapat 3 responden memilih angka 5 ke bawah
e. tingkat permintaan pasar	<b>Support bentuk sedang</b> , nilai rata-rata sebesar 4,27. 8 responden memilih angka 5 ke bawah.
f. infrastruktur dan permodalan telah mencukupi	<b>Support bentuk sedang</b> , nilai rata-rata sebesar 4,91. 7 responden memilih angka 5 ke bawah.
g. mendukung program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di hari tua.	<b>Support bentuk kuat</b> , nilai rata-rata dari jawaban 6,55. Hampir setengah dari responden atau sebanyak 6 dari 11 responden memilih angka 7.

Sumber: kuesioner, diolah

Dari tabel rekapitulasi di atas, didapatkan informasi sebagai berikut :

1. Terdapat 4 hal yang dinilai **sangat penting** (*support* bentuk kuat) bagi BPD (responden) jika ditanyakan aspek yang mempengaruhi keputusan mendirikan DPLK yaitu:
  - a. Pendirian DPLK dilakukan untuk mendukung program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di hari tua.
  - b. Pendirian DPLK dapat meningkatkan posisi dana kelolaan
  - c. Pendirian DPLK dapat meningkatkan *image* bank
  - d. Pendirian DPLK dapat mendukung pemasaran produk Bank untuk menarik nasabah baru
2. Terdapat 3 hal yang dinilai **agak penting** (*support* bentuk sedang) bagi BPD (responden) jika ditanyakan aspek yang mempengaruhi keputusan mendirikan DPLK yaitu:

- a. Pendirian DPLK dapat meningkatkan pendapatan Bank.
- b. Pendirian DPLK dipengaruhi oleh tingkat permintaan pasar
- c. Pendirian DPLK harus didukung oleh infrastruktur dan permodalan telah mencukupi

Teknik yang sama juga digunakan untuk menilai seberapa kuat faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan BPD untuk TIDAK mendirikan DPLK. Analisis dilakukan dengan menggunakan 3 kelompok *support* yang merupakan rata-rata dari jawaban seluruh responden.

**Tabel 10 Aspek yang mempengaruhi keputusan untuk TIDAK mendirikan DPLK**

Aspek yang mempengaruhi	Hasil Analisis
a. biaya proses pendirian DPLK yang tinggi	<b>Support bentuk sedang</b> , nilai rata-rata sebesar 3,33. Terdapat 4 responden memilih angka 5 ke bawah.
b. tidak/belum memahami program pensiun	<b>Support bentuk sedang</b> , nilai rata-rata sebesar 3,50. Terdapat 5 responden memilih angka 5 ke bawah.
c. permintaan yang rendah atas produk DPLK	<b>Support bentuk kuat</b> , nilai rata-rata dari jawaban 5,83. Tidak terdapat responden memilih angka 5 ke bawah
d. lebih memilih sebagai agen penjualan produk lain ( <i>misalnya reksadana atau produk perbankan lainnya</i> )	<b>Support bentuk sedang</b> , nilai rata-rata sebesar 3,33. Terdapat 4 responden memilih angka 5 ke bawah.
e. kondisi perekonomian lokal yang belum memungkinkan	<b>Support bentuk sedang</b> , nilai rata-rata sebesar 4,50. 4 responden memilih angka 5 ke bawah.
f. kekhawatiran produk tidak diterima pasar	<b>Support bentuk kuat</b> , nilai rata-rata dari jawaban 5,50. Terdapat 1 responden memilih angka 5 ke bawah
g. kekhawatiran akan kesulitan mengelola dplk	<b>Support bentuk kuat</b> , nilai rata-rata dari jawaban 5,50. Terdapat 2 responden memilih angka 5 ke bawah.
h. tidak/belum memahami pengelolaan dana secara benar	<b>Support bentuk sedang</b> , nilai rata-rata sebesar 4,17. Terdapat 3 responden memilih angka 5 ke bawah.
i. tidak/belum ada intensif yang menguntungkan bagi Bank	<b>Support bentuk sedang</b> , nilai rata-rata sebesar 4,67. Terdapat 4 responden memilih angka 5 ke bawah.

Sumber: kuesioner, diolah

Dari tabel rekapitulasi di atas, didapatkan informasi sebagai berikut :

1. Terdapat 3 hal yang dinilai **sangat penting** (*support* bentuk kuat) bagi BPD (responden) jika ditanyakan aspek yang mempengaruhi keputusan BPD untuk TIDAK mendirikan DPLK yaitu:
  - a. permintaan yang rendah atas produk DPLK.
  - b. kekhawatiran produk tidak diterima pasar
  - c. kekhawatiran akan kesulitan mengelola dplk
  
2. Terdapat 6 hal yang dinilai **agak penting** (*support* bentuk sedang) bagi BPD (responden) jika ditanyakan aspek yang mempengaruhi keputusan BPD untuk TIDAK mendirikan yaitu:
  - a. tidak/belum ada intensif yang menguntungkan bagi Bank
  - b. kondisi perekonomian lokal yang belum memungkinkan
  - c. tidak/belum memahami pengelolaan dana secara benar
  - d. tidak/belum memahami program pensiun
  - e. biaya proses pendirian DPLK yang tinggi
  - f. lebih memilih sebagai agen penjualan produk lain (*misalnya reksadana atau produk perbankan lainnya*)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan seluruh informasi yang telah berhasil dikumpulkan, penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari Indikator internal seperti CAR, LDR dan NPL mayoritas BPD memiliki potensi yang besar untuk mendirikan DPLK. Kesiapan internal Bank seperti dukungan system informasi juga memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola program pensiun.
2. Analisis pada indikator eksternal menghasilkan 8 daerah yang potensial bagi pengembangan industri DPLK
3. Berdasarkan gabungan faktor internal dan eksternal, terdapat 4 BPD yang berpotensi sebagai pendiri DPLK dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
4. Upaya Bank mendukung program pemerintah menjadi alasan yang paling mempengaruhi bank untuk mendirikan DPLK
5. Kekhawatiran akan penolakan pasar terhadap DPLK menjadi alasan utama Bank untuk tidak mendirikan DPLK

#### **V.2 Rekomendasi**

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh Bapepam-LK dalam upaya pengembangan program pensiun khususnya DPLK:

1. Penerapan pensiun wajib tampaknya menjadi opsi yang paling memungkinkan bagi pengembangan program pensiun di Indonesia mengingat dukungan yang baik dari industri BPD dalam mensukseskan program pemerintah
2. Pengenalan lebih mendalam mengenai program pensiun perlu semakin gencar untuk dilaksanakan terutama bagi jajaran inti dari BPD mengingat masih banyak BPD yang tidak memahami pengelolaan dana dan operasional DPLK walaupun diantara mereka telah menjadi pengurus dana pensiun pemberi kerja (DPPK).

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Studi Potensi Jumlah Perusahaan Yang Dapat Melakukan Go Public Di Pasar Modal Indonesia: Laporan Penelitian*, Jakarta, 2009

Bank Indonesia. *Penelitian Potensi, Preferensi dan perilaku masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Barat*. Ringkasan Eksekutif, Jakarta, 2000

\_\_\_\_\_. *Penelitian Potensi, Preferensi dan perilaku masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Ringkasan Eksekutif, Jakarta, 2000

\_\_\_\_\_. *Penelitian Potensi, Preferensi dan perilaku masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Sumatera Utara*. Ringkasan Eksekutif, Jakarta, 2003

\_\_\_\_\_. *Studi Potensi Pendirian Kantor Bank Umum dan BPR di Sumatera Utara*. Ringkasan Eksekutif, Jakarta, 2005

Brassington, F, Pettit, S. *Principles of Marketing 2<sup>nd</sup> ed*, Pearson Education Limited, London 2002

Departemen Keuangan RI. *Undang-undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun*. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);

Departemen Keuangan RI. *Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan*. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);

Kraemer, Kenneth L; Dedrick, Jason. *Market Potential Analysis: A Methodology for estimating the Market Potensial for Computer and Other Information Technologies*, University of California, Irvine, May 1998

Michael John Baker; Susan J Hart. *The marketing book, 6<sup>th</sup> ed*, Oxford ; Boston : Butterworth-Heinemann, 2008.

Philip Kotler; Ned Roberto; Nancy Lee. *Social Marketing : Improving the quality of life, 2<sup>nd</sup> ed* Thousand Oaks, California ; London : SAGE, 2002.